

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di tengah arus globalisasi yang terus bergerak, permintaan terhadap tenaga kerja mengalami peningkatan seiring dengan perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin dinamis. Persaingan dalam dunia kerja pun menjadi semakin ketat, sehingga mendorong setiap individu untuk berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup yang juga kian kompleks. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak terhadap kelompok usia produktif, tetapi juga berdampak secara tidak langsung dalam mendorong sebagian anak-anak untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi keluarga. Di tengah tekanan ekonomi yang tinggi, banyak keluarga di Indonesia yang menjadikan kontribusi ekonomi anak sebagai strategi bertahan hidup, meskipun hal tersebut mengorbankan hak anak atas pendidikan dan kehidupan yang lebih baik dimasa depan (Sinaga & Wahyudi, 2025).

Anak memiliki peranan yang penting dalam mendorong pembangunan bangsa di masa yang akan mendatang dan merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa. Dengan demikian, pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap usianya sangat diperlukan agar mereka dapat menjadi warga negara yang produktif di kemudian hari (UNICEF, 2020). Setiap orang tua wajib menjamin anak-anak mereka untuk mendapatkan hak-haknya agar di masa yang akan datang menjadi manusia yang lebih unggul. Namun, kenyataannya masih ada anak di Indonesia yang harus bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan demi membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

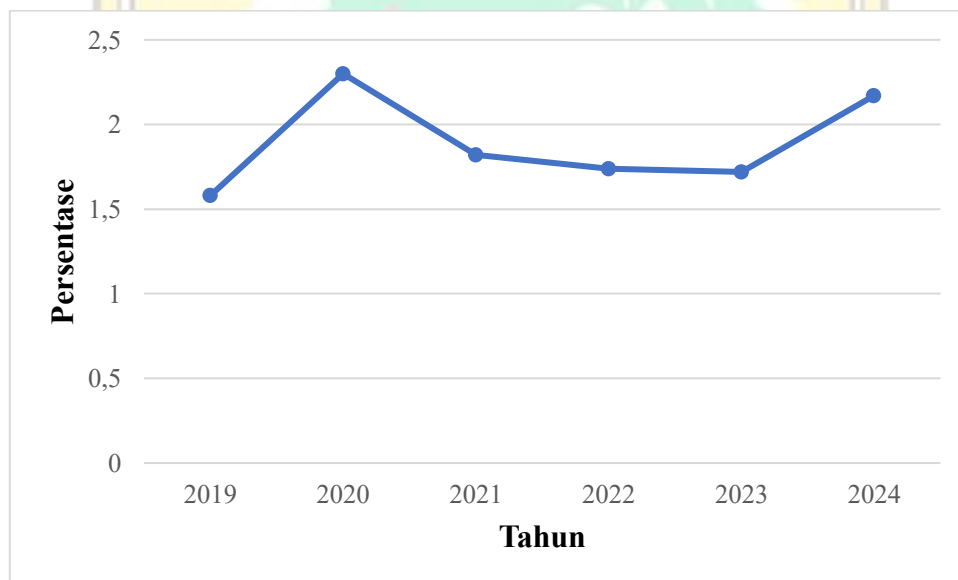
Pekerja anak merupakan sebuah istilah yang diperuntukan bagi anak berusia 5-17 tahun yang bekerja (Suryaningrum & Maulana, 2022). Salah satu faktor utama munculnya fenomena ini adalah tingkat kemiskinan keluarga dan keterbatasan terhadap akses pendidikan yang memaksa keluarga memanfaatkan tenaga anak-

anakny demi bertahan hidup (Basu & Van, 1998). Dalam hal ini, orang tua yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terpaksa harus mempekerjakan anak mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fenomena pekerja anak ini, seorang anak akan memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja sehingga waktu mereka untuk belajar dan bermain akan berkurang (Nursita, 2022).

Salah satu yang menjadi faktor penyebab anak memilih untuk menjadi pekerja anak adalah kemiskinan. Berdasarkan data yang disajikan Badan Pusat Statistik Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia berada pada angka 25.219,20 juta jiwa. Tingginya angka tersebut dapat memicu meningkatnya anak-anak untuk terlibat langsung dalam pasar kerja. Hal ini tentunya mengakibatkan terjadinya lingkaran setan kemiskinan (Suryaningrum & Maulana, 2022). Lingkaran setan kemiskinan adalah kondisi ketika pendapatan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, sehingga produktivitasnya tetap rendah dan akhirnya pendapatannya tetap kecil sehingga kemiskinan terus berulang. Pekerja anak yang lahir dari keluarga miskin berkemungkinan besar mengalami putus sekolah sehingga mengakibatkan anak ini akan sulit dalam bersaing di masa yang akan datang. Dengan demikian, upah yang diperoleh akan rendah. Para pekerja anak ini akan menciptakan masalah yang sama berupa pekerja anak untuk generasi selanjutnya (Muflih & Wijaya, 2024). Dengan adanya permasalahan ini, diharapkan generasi baru perlu menghapus lingkaran setan ini dengan membiarkan anak-anak bersekolah dari pada bekerja untuk menghasilkan kualitas manusia yang terdidik di masa depan dan dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Keputusan anak untuk memasuki pasar kerja pada umumnya bukan sepenuhnya berasal dari anak itu sendiri, melainkan ditentukan oleh orang tua atau keluarga sebagai respon terhadap tekanan ekonomi rumah tangga (Nursita, 2022). Dalam kondisi keterbatasan pendapatan, anak kemudian diarahkan untuk bekerja agar dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya waktu untuk belajar yang pada akhirnya meningkatkan risiko putus sekolah.

Gambar 1.1 memperlihatkan persentase pekerja anak di Indonesia periode 2019–2024 yang menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2019 angka pekerja anak tercatat 1,6% dan melonjak tajam menjadi 2,3% pada 2020, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, persentase menurun dan relatif stabil pada kisaran 1,7–1,8% sepanjang 2021 hingga 2023, mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta berbagai upaya perlindungan sosial. Namun, pada 2024 angka tersebut kembali meningkat menjadi 2,2%, menandakan bahwa tantangan penghapusan pekerja anak masih berlangsung dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif. Data ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan perlindungan anak agar dapat menekan angka pekerja anak secara konsisten di masa mendatang.



**Gambar 1. 1 Persentase Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Kementerian PPPA, 2025

Pendidikan dianggap sebagai upaya yang strategis dalam memutus rantai kemiskinan dan juga mengurangi pekerja anak. Dalam teori *Human Capital* pendidikan dianggap sebagai investasi pada sumber daya manusia. Peningkatan dan juga keterjangkauan akses terhadap pendidikan telah banyak digunakan di berbagai

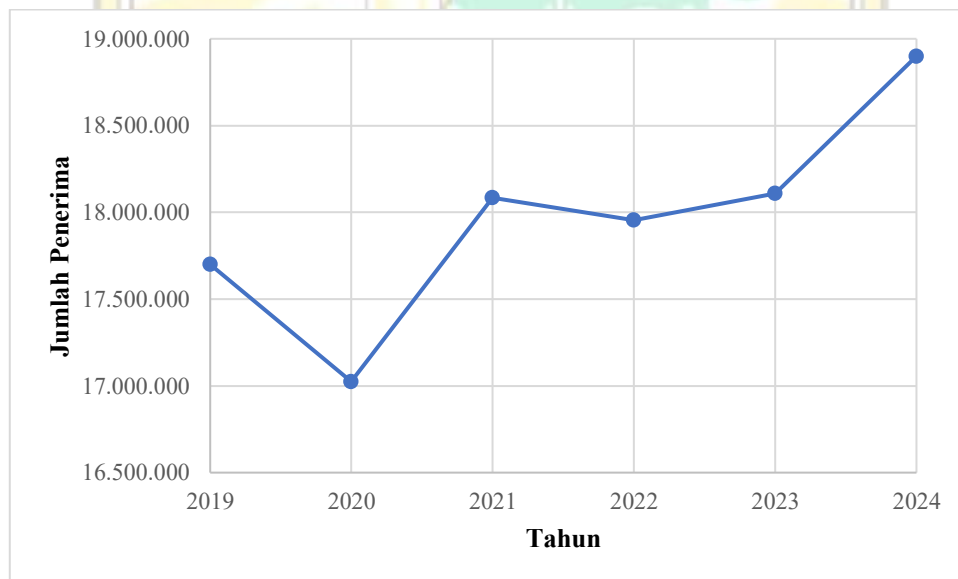
negara. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Kozhaya dan Martinez Flores (2022) menunjukkan bahwa perpanjangan jam sekolah melalui program *Full-Time* (FTS) di Mexico mampu menurunkan jam kerja anak dan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk kegiatan sekolah. Temuan serupa juga ditemukan di Tanzania, dimana adopsi layanan keuangan digital seperti *Mobile money* menurunkan tingkat pekerja anak melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengeluaran untuk pendidikan (Ajefu & Massacky, 2023).

Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai wujud dari komitmen dalam mengoptimalkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau rentan. Sebagai bagian dari pelaksanaan program ini, siswa menerima bantuan dana langsung yang ditujukan untuk menutupi biaya pendidikan sekaligus menekan risiko mereka terlibat dalam aktivitas kerja. Studi oleh Sihombing, Pratiko, dan Alkahfi (2022) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam PIP secara signifikan meningkatkan kemungkinan anak tetap bersekolah. Meskipun demikian, jumlah anak yang bekerja di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan sektor informal.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, rentan miskin, atau kelompok prioritas agar tetap dapat mengakses pendidikan hingga menyelesaikan jenjang menengah. Program ini diperuntukan bagi pelajar yang mengikuti pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun lembaga non formal. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menekan angka putus sekolah sekaligus memfasilitasi kembalinya anak-anak yang telah menghentikan proses belajarnya ke jalur pendidikan formal. Selain itu, PIP diharapkan dapat membantu keluarga peserta didik dalam menanggulangi berbagai pengeluaran pendidikan, sehingga akses belajar menjadi lebih terjangkau.

Jika dibandingkan dengan bantuan pendidikan lainnya, Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki peran yang lebih spesifik karena bantuan diberikan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk kebutuhan operasional sekolah, PIP lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi siswa, seperti biaya perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan penunjang belajar lainnya. Dengan bantuan yang diterima secara langsung oleh peserta didik, program ini diharapkan dapat membantu anak tetap bersekolah dan mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam pekerjaan akibat keterbatasan ekonomi keluarga (Kemendikdasmen, 2024; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025)

Jumlah dana manfaat penerima PIP yang diperoleh oleh peserta didik berbeda tiap tingkat pendidikan. Peserta didik pada tingkat SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,00/Tahun, tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar Rp750.000,00/Tahun, dan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 1.000.000,00/Tahun.



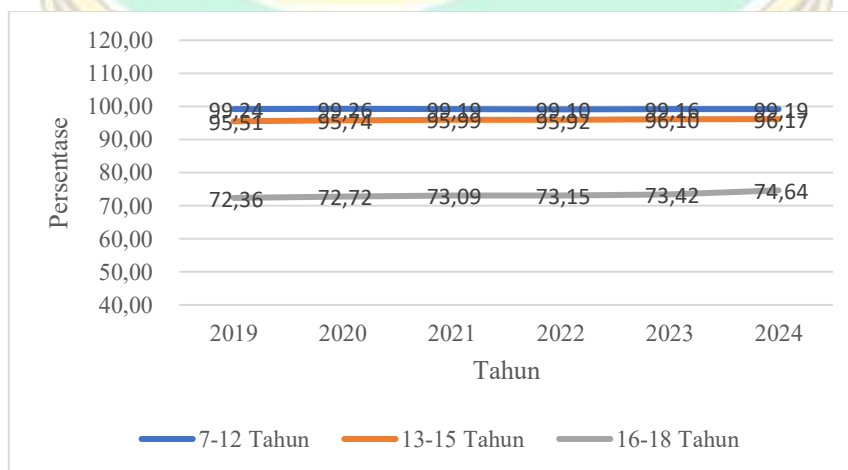
**Gambar 1. 2 Grafik Penerima PIP di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia menunjukkan

tren yang meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini tentunya menjelaskan bagaimana negara berkomitmen untuk memberikan hak pendidikan terhadap semua anak. Meskipun tren pekerja anak ini mengalami penurunan secara tajam pada tahun 2020 yang mana diakibatkan oleh covid-19 yang pada masa itu negara mengalami perubahan prioritas anggaran. Namun, pada tahun 2021 mengalami lonjakan yang dipengaruhi oleh pemulihan pasca pandemi dan dorongan pemerintah untuk menjaga anak tetap bersekolah. Peningkatan jumlah penerima bantuan PIP ini terbilang meningkat cukup stabil hingga tahun 2024.

Berdasarkan publikasi laman PIP Kemdikbud (2024) penyebaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penerima tertinggi berada di Jawa Barat sebanyak 3.513.022 siswa, diikuti Jawa Tengah sebanyak 2.753.960 siswa, dan Jawa Timur sebanyak 2.218.238 siswa, sedangkan jumlah penerima terendah terdapat di Papua Pegunungan sebanyak 15.928 siswa, Papua Tengah sebanyak 34.546 siswa, dan Papua Barat sebanyak 36.968 siswa. Secara umum, provinsi dengan jumlah penduduk besar cenderung memiliki jumlah penerima yang lebih tinggi, karena sasaran program ini mengikuti jumlah peserta didik yang memenuhi kriteria pada masing-masing wilayah. Selain itu, efektivitas cakupan PIP juga dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia.



**Gambar 1. 3Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia Tahun 2019-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar tersebut menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia berdasarkan kelompok usia selama periode 2019–2024. Secara umum, APS pada kelompok usia 7–12 tahun berada pada tingkat yang sangat tinggi dan relatif stabil, yaitu berkisar antara 99 persen. Hal yang sama juga terlihat pada kelompok usia 13–15 tahun yang cenderung stabil pada kisaran 95–96 persen. Namun, pada kelompok usia 16–18 tahun, APS masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, meskipun menunjukkan tren peningkatan dari 72,36 persen pada tahun 2019 menjadi 74,64 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi usia anak, semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan partisipasi sekolah. Rendahnya partisipasi sekolah pada kelompok usia 16–18 tahun dapat menjadi indikasi adanya anak yang berisiko keluar dari sistem pendidikan dan berpotensi terlibat dalam kegiatan bekerja.

Pengurangan angka pekerja anak merupakan bagian penting dari partisipasi aktif Indonesia dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (Suryaningrum & Maulana, 2022). Ini tercantum dalam tujuan ke 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang mana pada target 8.7 menekankan tentang penghapusan segala bentuk pekerja anak pada tahun 2025. Upaya untuk mendukung pendidikan anak dan mengurangi pekerja anak melalui program PIP merupakan strategi yang dapat mendukung pencapaian SDGs secara menyeluruh.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui fokus kajian pada dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap pekerja anak di Indonesia, dengan memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024 sebagai sumber utama. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti faktor-faktor yang mendorong seorang anak masuk ke pasar kerja, seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, maupun lingkungan sosial. Namun, masih sangat terbatas studi yang secara khusus menilai efektivitas suatu program pemerintah dalam menekan angka pekerja anak. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk

menutup celah tersebut dengan memberikan perspektif baru, yaitu melihat sejauh mana intervensi kebijakan melalui PIP mampu berkontribusi dalam mengurangi keterlibatan anak dalam dunia kerja.

Namun, efektivitas PIP dalam menekan angka pekerja anak masih menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menguji secara kuantitatif apakah Program Indonesia Pintar dapat mempengaruhi pekerja anak di Indonesia. Penelitian ini penting karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu, pekerja anak di Indonesia dihapuskan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam dunia pendidikan terkhususnya dalam bidang Ekonomi Sumber Daya Manusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi pekerja anak. Dengan pendekatan tersebut, permasalahan terkait pekerja anak dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah Program Indonesia Pintar (PIP) berdampak terhadap pengurangan jumlah pekerja anak di Indonesia?
2. Apa saja faktor lain yang mempengaruhi probabilitas angka pekerja anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dampak PIP terhadap pengurangan pekerja anak di Indonesia secara empiris.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang turut mempengaruhi probabilitas seorang anak menjadi pekerja anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam kajian ekonomi ketenagakerjaan dan kependudukan. Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur yang membahas dampak Program Indonesia Pintar terhadap fenomena pekerja anak di Indonesia. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan bagi kajian-kajian mendatang yang mengangkat isu serupa terkait keterlibatan anak dalam dunia kerja.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dalam rangka penanggulangan isu pekerja anak di Indonesia. pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam merancang program yang lebih responsif dan efektif untuk mengatasi permasalahan berupa pekerja anak di Indonesia.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama bagi keluarga penerima manfaat Program Indonesia Pintar mengenai sejauh mana Program Indonesia Pintar tersebut efektif dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak di Indonesia.